



Minta Ada Kesepakatan Dengan PKL

Keluhan PPMAY Soal Malioboro Semipedestrian

Kami mendukung penerapan itu, asal pemerintah menyiapkan infrastruktur yang baik.

Sadana Mulyono
Ketua PPMAY

YOGYA, TRIBUN - Puluhan pedagang yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY), mendatangi kantor Wali Kota Yogyakarta pada Selasa (17/12) pagi. Tiba sejak pukul 09.00 di kompleks balai kota, para pelaku usaha mesti menahan diri saat ingin menyampaikan setumpuk persoalan yang dihadapi.

Wacana Malioboro yang akan menjadi semipedestrian penuh pada awal 2020 mendatang, menjadi pokok persoalan para pedagang hingga kemudian ingin bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta guna membahas permasalahan tersebut.

Pro-Kontra Semipedestrian

- PPMAY meminta pemkot melengkapi infrastruktur pendukung sebelum penerapan semipedestrian penuh di Malioboro.
- Sejak penerapan Selasa Wage (uji coba Malioboro semipedestrian) para pedagang merasakan sepinya pembeli.

Salah satu yang diminta PPMAY ke pemkot adalah adanya kesepakatan terbaik dengan para PKL. Tiik parkir yang terlalu jauh dengan kompleks pertokoan pun diminta untuk dipikirkan.



Rencananya pemerintah akan menerapkan Malioboro semipedestrian penuh pada awal 2020.

ke halaman 15

GRAFIS: FAUZIA RAKHMAN

Instansi	Nilai Ber	Kategori
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.		

Minta Ada Kesepakatan

• Sambungan Hal 9

Soal yang dituntut PPMAY sebenarnya bukan barang baru. Sejak pemerintah menerapkan kebijakan Selasa Wage di Malioboro pada Juni lalu, di mana tidak boleh satu kendaraan bermotor pun yang dapat melintas di lokasi itu, kecuali beberapa kendaraan membuat sejumlah pelaku usaha gusar.

Pun tuntutan yang diajukan saat ingin bertemu Wali Kota Yogyakarta. Mereka berpendapat pemerintah belum siap dalam menerapkan aturan itu. Pasalnya ada sejumlah fasilitas dan juga persoalan lain yang timbul sewaktu Malioboro dijadikan sebagai kawasan semipedestrian.

Setelah menunggu sekitar satu setengah jam, puluhan pedagang akhirnya dapat bertemu dengan perwakilan Pemkot Yogyakarta yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Sekda Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, serta beberapa kepala dinas terkait. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam lebih itu dimanfaatkan pedagang

dengan mengeluarkan seluruh unek-unek dan kekawatiran mereka kala Malioboro menjadi kawasan semipedestrian penuh.

Ketua PPMAY, Sadana Mulyono mengatakan, salah satu persoalan yang hingga saat ini belum diselesaikan Pemkot Yogya adalah penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan itu. PPMAY meminta ada perjanjian antarpihaknya dengan para PKL yang bakal mengatur kesepakatan yang bijaksana antara para pedagang dengan para PKL. Selain itu, ia berpendapat penerapan Malioboro semipedestrian juga menyebabkan penumpukan kendaraan di sekitar Jalan Mataram, hingga ke area lain.

"Apalagi kalau diterapkan setiap hari, satu hari saja sudah semrawut. Kami mendukung penerapan itu, asal pemerintah menyiapkan infrastruktur yang baik. Jadi pengendara juga enak, pengusaha nyaman. Kalau sekarang pengusaha sepi tokonya," klaim dia.

Menurut Sadana, keberadaan titik parkir yang cukup jauh di kawasan area Abu Bakar Ali masih belum representatif. Pengunjung dinilainya masih akan terlalu jauh untuk menjang-

kau kawasan pertokoan di Malioboro. Alternatif yang ditawarkan dengan menaiki andong atau becak pun dianggapnya tidak menjadi jalan keluar dari persoalan.

Pasalnya, semipedestrian di Malioboro membuat area jalan dimanfaatkan sebagian besar pengunjung dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Sehingga dianggapnya rentan menimbulkan gangguan. "Kalaupun mau diterapkan secara total pemerintah mesti punya lahan parkir yang memadai. Kalau pun tidak ada, jangan memaksakan," ujarnya.

Kartu pas

Sementara, Koordinator PPMAY, Karyanto Yudomulyono berpendapat bahwa, kebijakan Malioboro semipedestrian mesti pula dibarengi dengan pemberian semacam kartu kepada para pelaku usaha di kawasan itu. Selain itu, penataan juga mesti dilakukan pada bagian sirip jalan agar terkesan tidak kumuh dan juga sedap dipandang pengunjung.

"Bisa diberikan semacam kartu pas yang fungsinya sebagai akses masuk ke toko. Pada sirip-sirip jalan juga ditata agar tidak terlalu kumuh dan dapat memberikan kesan yang nyaman bagi para pengunjung," katanya. (jst)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005